



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2022**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Daerah (Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berikut ini disampaikan LKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.

LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis merupakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perjanjian kinerja, hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas termasuk didalamnya keberhasilan atau kegagalan serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program/kegiatan.

LAKIP ini menyajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan SKPD yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi anggaran.

Hasil dari penyusunan LAKIP Tahun 2022 diharapkan menjadi bahan masukan bagi penentuan kebijakan dalam melanjutkan sasaran, program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIAMIS**



Drs. SYARIEF NURHIDAYAT, M.Si

NIP. 19640920 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Permintaan kebutuhan pangan berupa protein hewani semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu diperlukan protein hewani yang HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat) dan terjamin kualitas gizinya. Daging, telur dan ikan merupakan sumber protein hewani yang menjadi pilihan masyarakat pada umumnya. Untuk itu ketersediaan daging, telur dan ikan harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan nyata. Protein hewani ini harus dapat ditingkatkan dari segi kualitas, kuantitas maupun keanekaragamannya, sehingga dapat menjaga stabilitas harga di pasar dan terhindar dari kelangkaan di pasar.

Peningkatan kebutuhan tersebut dapat memberdayakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dalam kegiatan peternakan dan perikanan. Selain itu, dapat menciptakan lapangan usaha di masyarakat, juga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berikut ini disampaikan LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Ciamis dan Banjarsari sebesar Rp. 32.225.000,00. Retribusi Pasar Hewan Ciamis, Rancah, Rajadesa, Panjalu, Lakbok, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi) sebesar Rp. 26.956.000,00. Hasil sewa BMD dari enam Pasar Ikan (Imbanagara, Cihaurbeuti, Golat, Maleber, Banjarsari dan Kawali) sebesar Rp. 36.600.000,00. Jumlah total keseluruhan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 95.781.000,00. Adapun realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 95.781.000,00 atau mencapai 100%.

Berdasarkan sumber anggarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pencapaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Non Urusan	1 Program 6 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	6.741.345.917	6.713.039.442	99,58	28.306.475
2	APBD Kab. Urusan Pilihan	6 Program 11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	10.812.987.000	10.692.257.353	98,88	120.729.647
3	APBD Prov.	3 Program 4 Kegiatan	PM	PM	100	-
4	APBN	4 Program 7 Kegiatan	PM	PM	100	-
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Program 1 Kegiatan	1.800.000.000	1.798.652.000	99,92	1.348.000

Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan DAK tahun 2022 yang berasal dari efisiensi sisa kontrak.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp. 19.354.332.917,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.203.948.795,00 atau mencapai 99,22%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150.384.122,00.

PAD Tahun 2022 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 31 Desember 2022 ditargetkan sebesar Rp. 95.781.000,00. Target PAD tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan PAD tahun 2021. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 mencapai Rp. 95.781.000,00 atau 100%.

Capaian realisasi produksi ternak dan ikan di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sehingga dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2022. Prestasi ini membanggakan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. Terutama untuk komoditas unggulan seperti daging, telur, ikan nila dan ikan mas. Selain itu, kedepan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi ternak dan budidaya ikan akan ditambah guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan ikan sehingga akan

berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Ciamis.

Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran di Kabupaten Ciamis diantaranya keterbatasan jumlah tenaga teknis, medis dan paramedis yang menangani masalah peternakan dan perikanan; belum terdatanya usaha pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Ikan, tempat pemotongan hewan dan unggas skala kecil, pasar yang menjual PAH, olahan PAH dan ikan di Wilayah Kabupaten Ciamis; menurunnya produksi ikan di perairan umum; serta serangan penyakit ikan disebabkan oleh fluktuasinya suhu perairan dan curah hujan yang tinggi, terbatasnya jumlah maupun mutu induk unggul.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan perternakan (lahan penggembalaan) dan perikanan (kolam ikan) yang menyebabkan semakin menurunnya lahan pertanian di wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk itu pembangunan wilayah Kabupaten Ciamis haruslah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah dicanangkan dengan harapan meski lahan peternakan dan perikanan semakin berkurang namun produksi dan produktivitas ternak dan ikan dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi dan introduksi teknologi secara tepat guna.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1
I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
II.1. VISI DAN MISI	25
II.1.1. VISI	25
II.1.2. MISI	26
II.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	27
II.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	29
II.3.1. STRATEGI	29
II.3.2. KEBIJAKAN	29
II.4. PERJANJIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
a. Target dan Realisasi Tahun 2021	34
b. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	34
c. Analisis Permasalahan dan Solusi Pencapaian Target Kinerja	36
d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja dan Capaian Sasaran Strategis	39
III.2 REALISASI ANGGARAN	48
III.2.1. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	48
III.2.2. REALISASI PENDAPATAN DAERAH	60
III.2.3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	63
BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perjanjian Kinerja 2022	31
2. Program dan Kegiatan 2022.....	32
3. Permasalahan dan Solusi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022	37
4. Target dan Realisasi Produksi Daging Tahun 2022	40
5. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022	44
6. Target dan Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022	45
7. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022	47
8. Target Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022	61
9. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022	62
10. Realisasi Belanja Langsung	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2021 dan 2022	35
2. Realisasi Produksi Telur Tahun 2021 dan 2022	36
3. Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2021 dan 2022	37
4. Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2021 dan 2022	37
5. Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022	64
6. Persentase Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2022	66

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2022	70
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2022	71

I. PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 20' sampai dengan 108° 40' Bujur Timur dan 7° 40' 20" sampai dengan 7° 41' 20" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah. (Sumber : RPJMD Kab. Ciamis, 2014 - 2019).

Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 27 Kecamatan memiliki potensi kekayaan dan keanekaragaman hayati berupa sumber daya peternakan dan perikanan. Komoditas unggulan dari budidaya peternakan antara lain Sapi Pasundan, Ayam Sentul, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur dan domba. Sedangkan komoditas unggulan dari budidaya ikan air tawar antara lain Gurame, Nila dan Udang Galah. Potensi daerah tersebut haruslah dikelola dengan arif dan bijaksana guna memberikan hasil yang optimal. Diperlukan peran serta aktif dari instansi pemerintah agar dapat mengatur, mengarahkan dan memberikan dorongan yang tepat dan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis.

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan dititikberatkan pada usaha petani ternak dan ikan yang berwawasan agribisnis dalam upaya peningkatan perekonomian di pedesaan dengan tetap memprioritaskan peningkatan produksi protein hewani asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) sebagai bahan konsumsi masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat yang positif terhadap setiap langkah pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan sehingga dapat mengembangkan potensi daerah yang ada. Potensi daerah tersebut diharapkan dapat memunculkan komoditas unggulan yang menjadi sentra pengembangan ternak dan ikan.

Pembangunan peternakan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang menjanjikan, hal ini ditunjang dengan kondisi

berikut :

- Modal dasar berupa sumber daya alam, dengan kondisi iklim yang kondusif serta lahan garapan yang masih luas.
- Sumber daya manusia, penduduk Kabupaten Ciamis tenaga kerja produktif cukup banyak dan melimpah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 – 2031, dibagi menjadi :

- a. Kawasan Peruntukkan Peternakan (rumpun pertanian), meliputi:
 - Sentra pengembangan sapi potong tersebar di Panumbangan, Panjalu, Sukamantri, Rancah Tambakasari, Pamarican dan Sadananya;
 - Sentra pengembangan ternak besar sapi perah, dengan lokasi di Kecamatan Cikoneng, Panjalu, Cihaurbeuti, dan Sidangkasih;
 - Sentra pengembangan ternak domba dan kambing tersebar di Panjalu, Lumbung, Rajadesa, Cimaragas, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Cihaurbeuti, Cidolog, Lakbok dan Sukadana;
 - Sentra pengembangan ternak ayam buras tersebar di Ciamis, Cipaku, Cijeungjing, Cikoneng, Sindangkasih, Baregbeg, Rancah, Cisaga dan Sukadana;
 - Sentra pengembangan Ayam Ras Pedaging tersebar di Ciamis, Cipaku, Kawali, Panawangan, Lumbung, Jatinagara, Rajadesa, Rancah, Panjalu, Sukamantri, Panubangan, Cihaurbeuti, Sidangkasih, Cisaga dan Cijeungjing;
 - Sentra Pengembangan Ayam Ras Petelur tersebar di Cisaga, Cipaku, Sukamantri dan Panjalu;
 - Sentra Pengembangan Itik tersebar di Lakbok, Purwadadi, Panumbangan;
 - Penyediaan pakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari, Cijeungjing, Panjalu, Kawali, Sidangkasih, Panumbangan, Sukamantri dan Panawangan;
 - Pengolahan hasil peternakan berupa industri pengolahan hasil peternakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis,

Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Cijeungjing dan Banjarsari;

b. Kawasan Peruntukkan Perikanan, meliputi:

✓ Perikanan tangkap, terdiri dari:

- Perairan umum rawa, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Tambaksari, Rancah, Purwadadi;
- Perairan umum danau atau situ atau cekdam, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung dan Sukamantri;
- Pemanfaatan danau atau situ, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Pemanfaatan cekdam dan perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.

✓ Budidaya perikanan terdiri dari:

- Budidaya air tawar kolam air tenang, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- Budidaya air tawar kolam air deras, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Lumbung;
- Budidaya air tawar mina padi, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Lakbok, Cidolog, Sukamantri.

✓ Pengolahan ikan, industri pengolahan ikan di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Cimaragas, Cisaga, Tambaksari, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Purwadadi.

✓ Penyediaan prasarana perikanan, dengan lokasi di Balai Benih Udang Galah (BBUG) Kecamatan Pamarican, BBI Sukamaju Kecamatan Baregbeg, Pasai Ikan Banagara Kecamatan Ciamis, Pasar Ikan Kecamatan Cihaurbeuti, Pasar Ikan Kecamatan Panumbangan dan Pasar Ikan Cileungsir Kecamatan Rancah.

- ✓ Sentra Fokus Pengembangan,
 - Sentra pengembangan Ikan Gurame di Panumbangan, Panjalu, Ciamis, Baregbeg, Cikoneng, Sindangkasih, Rajadesa, Banjarsari, Panjalu dan Cijeungjing;
 - Sentra Ikan Nila di Cijeungjing, Panumbangan, Kawali, Cipaku, Sadananya, Cisaga, Banjarsari, Ciamis dan Cihaurbeuti;
 - Sentra pengembangan lele di Cikoneng, Sidangkasih, Sadananya dan Banjarsari;
 - Sentra Udang Galah di Pamarican, Panumbangan dan Sidangkasih.

Permintaan komoditas hasil peternakan dan perikanan mengalami peningkatan permintaan seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan perkapita serta kecenderungan perubahan pola makan yang ditandai dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya produk hewani asal ternak dan ikan sebagai salah satu bahan makanan yang bergizi tinggi.

Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Ciamis, pemasaran hasil produk peternakan terbuka luas, karena letak Kabupaten Ciamis yang strategis berbatasan langsung dengan kota Cilacap, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dekat dengan kota besar Bandung, Cirebon dan Jakarta serta menguntungkan karena kualitas ternak dan ikan dari Kabupaten Ciamis dapat bersaing dengan produk peternakan dan perikanan dari daerah lain.

Sumber daya manusia (peternak dan pembudidaya ikan) memegang peranan yang sangat penting, sehingga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang pemeliharaan, perawatan, pembibitan/pembenihan bahkan sampai dengan pemasaran hewan ternak dan ikan. Peternak juga harus memahami kebutuhan hewan ternak, seperti pakan hijauan, konsentrat dan kesehatannya. Demikian halnya dengan pembudidaya ikan harus memahami kebutuhan perikanan seperti ketersediaan air, pakan dan kesehatan.

Adapun faktor utama penunjang peternakan dan perikanan diantaranya, hewan ternak dan ikan, lingkungan sekitar, introduksi teknologi dan sarana prasarana. Ternak dan ikan merupakan objek,

untuk itu perlu adanya perhatian lebih dari petani ternak/ikan sehingga dapat berkembang dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Lingkungan di sekitar harus diperhatikan baik itu perkandangan/kolam ataupun analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan. Teknologi yang berkembang saat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan ikan, menekan ongkos produksi pemeliharaan, menjaga ketersediaan pakan dan menjaga sumber air dari kekeringan di musim kemarau. Sarana dan prasarana merupakan alat dan mesin penunjang peternakan, sehingga pemeliharaan/budidaya dapat efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu agar memberikan hasil yang lebih optimal.

Isu - isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia Peternakan dan Perikanan yang berkualitas;
2. Ketersediaan indukan yang berkualitas;
3. Harga pakan ternak dan ikan semakin meningkat;
4. Penyerapan informasi pasar dan teknologi masih rendah;
5. Degradasi lahan peternakan dan perikanan yang potensial;
6. Daya saing hasil produksi peternakan dan perikanan masih rendah;
7. Sarana prasarana pendukung usaha peternakan dan perikanan belum memadai;
8. Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan Belum Optimal;

Kontribusi Produksi Peternakan dan Perikanan Terhadap Pemenuhan Gizi Masyarakat Sangat Dominan.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 54 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan kelautan perikanan sub urusan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Peternakan; dan
 2. Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
- e. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Perikanan; dan
 2. Seksi Sumber Daya Prasarana dan Sarana Perikanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- 2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan perikanan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di

- bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelola keuangan, kepegawaian dan umum.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Perencanaan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan, perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan, penyusunan dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
 - j. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan bahan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengerusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan

- 1) Bidang Produksi, Prasarana dan Saran Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya, pengembangan dan

penyebaran ternak, pengelolaan dan pengendalian produksi dan mutu produksi ternak, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan, serta pembinaan usaha peternakan.

3) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang produksi, prasarana dan sarana peternakan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbibitan, budidaya dan pakan ternak;
- c. penyusunan petunjuk, teknis, penyebaran dan pengembangan ternak;
- d. penyusunan petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan;
- e. penyusunan petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
- f. penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan;
- g. fasilitasi dan pembinaan permodalan serta kemitraan usaha;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

a) Seksi Produksi Peternakan

- 1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- 2) Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak.
- 3) Seksi Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak;

- b. pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alihmudigah) dan kawin alam;
- d. pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencataan dan uji performance ternak hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran semen beku;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penetapan lokasi wilayah perbibitan ternak dan pengaturan ternak bibit;
- g. pelaksanaan penyusunan silsilah ternak, sertifikasi dan penerapan standar perbibitan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran bibit ternak;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan

- 1) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- 2) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kapasitas sumber daya peternakan, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha, serta inventarisasi, faslitasi dan pengelolaan prasarana dan sarana peternakan.
- 3) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan alam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan kelembagaan bidang peternakan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan;
- c. faslitasi dan pembinaan kemitraan usaha peternakan;
- d. pelaksanaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan penyebaran hijauan pakan ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu serta pengedaran pakan ternak;
- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan air-irigasi, pengelolaan lahan dan areal mendukung peternakan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
- k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan;
- l. pembinaan dan bimbingan penataan areal/kawasan peternakan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan.
- 3) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian penyakit hewan dan ikan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengawasan peredaran obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner;
 - g. penyusunan petunjuk teknis, pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, produk ikan dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - h. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, ikan medik/paramedik;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan

- 1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan ikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan serta pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan hewan dan ikan.
- 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan surveilans, bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data kesehatan Hewan dan Ikan;
 - c. pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular dan penyakit ikan;
 - d. pelayanan kesehatan hewan dan ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
 - f. pengawasan lalu lintas hewan, ikan, sertifikasi hewan dan ikan serta penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan ikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan hasil ternak dan peredaran pangan asal hewan, ikan dan produk pangan asal hewan, ikan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis.
- 3) Seksi Kesehatan Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan dalam penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH), ikan dan produk PAH, ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pengawasan peredaran PAH, ikan dan produk PAH, ikan;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif serta penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner/Unit Usaha hewan dan ikan olahan hasil ternak dan ikan;
 - e. pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKPAH) dan ikan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - f. pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis hewan dan ikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, pengendalian mutu, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha peternakan dan perikanan;
 - b. bimbingan dan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan (ternak dan ikan);
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian mutu hasil peternakan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis analisa usaha peternakan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha peternakan dan perikanan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harga komoditas peternakan dan perikanan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi promosi produk peternakan dan perikanan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

- 1) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.
- 3) Bidang pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi penerapan teknologi pembenihan, budidaya, penebaran, dan penangkapan ikan;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pembenih, pembudidaya, nelayan perairan umum dan kelompok masyarakat pengawas perikanan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pembenihan budidaya ikan;
 - e. pembinan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penebaran dan penangkapan ikan di perairan umum;
 - f. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Produksi Perikanan

- 1) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
- 2) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi perikanan.
- 3) Seksi Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data potensi pembenihan dan budidaya ikan;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan pembenih dan budidaya ikan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan pembenih dan budidaya ikan;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan

- 1) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
- 2) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan.

- 3) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - b. pelaksanaan pemetaan potensi dan penetapan zoonasi pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pembenihan, budaya dan pengawasan perairan umum;
 - d. pelaksanaan penebaran ikan di perairan umum;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan kelompok masyarakat pengawas perikanan di perairan umum;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana pembenihan, budidaya, penebaran ikan dan pengawasan perairan umum;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan kelompok masyarakat pengawas di perairan umum;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) UPTD Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Ciamis, Kelas A;
 - b. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Panumbangan, Kelas A;

- c. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Kawali, Kelas A;
 - d. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Rancah, Kelas A;
 - e. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Banjarsari, Kelas A;
 - f. UPTD Perbibitan Ternak dan Perbenihan Ikan, Kelas A; dan
 - g. UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan Kelas A.
- 2) UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah

- 1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang peternakan dan perikanan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pembudidayaan perikanan dan pengembangan peternakan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Perbenihan Ikan

1. Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf f mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan bibit ternak dan pengembangan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan bibit ternak dan pengembangan benih ikan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan

- 1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf g mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan, baik sebelum dipotong (*ante mortem*)

maupun setelah dipotong (*post mortem*), pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*), pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - d. pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

- 4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PERENCANAAN KINERJA

II.1 VISI DAN MISI

II.1.1 VISI

Visi merupakan tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai lima tahun mendatang dari sebuah organisasi. Visi harus berorientasi ke depan, mengekspresikan kreatifitas, berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat dan tidak berdasarkan kondisi saat ini. Selain itu, visi harus mempertimbangkan kondisi daerah setempat, permasalahan pembangunan, tantangan yang akan dan sedang dihadapi serta isu-isu strategis pembangunan daerah.

Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dituangkan dalam rumusan sebagai berikut: **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua”**.

Dengan demikian maka makna dari visi tersebut adalah

- Menjadikan Ciamis sebagai sentra pangan hewani dari semua komoditi pangan hewani seperti ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan fokus komoditi unggulan ternak sapi, kambing/domba dan unggas terutama ayam buras, itik, ikan gurame, ikan emas, ikan nila, lele, udang galah dan ikan lainnya pada tahun 2020. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersama SKPD lain akan menggerakkan potensi lokal misalnya dalam penyediaan bahan baku pakan ternak dan ikan. Kebijakan strategis yang akan ditempuh bersama berupa peningkatan produktivitas komoditas ternak, ikan, penanganan kesehatan hewan/ikan dan pengamanan produk pangan asal ternak dan ikan agar produksi sesuai dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- Terwujudnya sentra pangan asal ternak dan ikan akan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor riil akan bergerak, peluang usaha

pendukung peternakan dan perikanan baik hulu maupun hilir akan terbuka sehingga pertumbuhan perekonomian akan bergerak naik

- Pertumbuhan perekonomian akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Asupan protein hewani asal ternak dan ikan yang baik terhadap anak sekolah akan meningkatkan kecerdasan dalam menempuh pendidikannya, disamping itu dapat pula meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

II.1.2 MISI

Misi merupakan strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun strategi tersebut dijabarkan melalui misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

- Misi 1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM peternakan dan perikanan
- Misi 2 Meningkatkan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan
- Misi 3 Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan
- Misi 4 Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

Makna yang terkandung dari misi tersebut adalah

1. Meningkatkan kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan dan Perikanan

Makna yang terkandung dalam misi 1 adalah dalam rangka mengembangkan agribisnis diperlukan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM Peternakan dan Perikanan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil peternakan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan

Makna yang terkandung dalam Misi 2 adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil peternakan dan perikanan perlu adanya teknologi yang ramah lingkungan, kemampuan manajerial dari pelaku yang

difasilitasi oleh aparatur pemerintah yang profesional, sehingga memiliki daya saing di pasar regional, nasional dan global

3. Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan

Makna yang terkandung dalam Misi 3 adalah untuk mengembangkan agribisnis diperlukan peran serta banyak pihak sebagai pelaku usaha, satu sama lain saling terkait dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan, proposional dan adil

4. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

Makna yang terkandung dalam Misi 4 adalah untuk mewujudkan ketentraman masyarakat diperlukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang bersifat *zoonosis*

II.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Tujuan, sasaran dan strategi mencapainya dari masing-masing Misi dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM peternakan dan perikanan

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan produksi peternakan dan perikanan

yang berkualitas

Sasaran (1) yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah terlayannya kepentingan masyarakat di bidang peternakan dan perikanan, dan tersedianya aparatur peternakan dan perikanan yang profesional

Sasaran (2) yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan

Misi 2 : Meningkatkan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersediaan pangan hewani dan pemenuhan pasar hasil peternakan dan perikanan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya volume produk unggulan, budidaya dan sarana prasarana peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan

Misi 3 : Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis peternakan dan perikanan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan melalui pola kemitraan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah berkembangnya jaringan pemasaran, volume dan nilai transaksi serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan

Misi 4 : Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan sistem pengendalian penyakit hewan, ikan menular dan Kesmavet

Sasaran (1) yang ingin dicapai adalah meningkatnya rasa aman dan tentram masyarakat dari penyakit hewan dan ikan

Sasaran (2) yang ingin dicapai adalah meningkatnya

produksi ternak dan ikan yang sehat dan berkualitas
Sasaran (3) yang ingin dicapai adalah menurunnya penyakit hewan dan ikan yang bersifat *zoonosis*

II.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

II.3.1 STRATEGI

Strategi untuk mencapai Misi 1 adalah melalui kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur peternakan dan perikanan yang profesional
2. Meningkatkan SDM pelaku agribisnis peternakan dan perikanan
3. Meningkatkan bimbingan teknis peternakan dan perikanan

Strategi untuk mencapai Misi 2 adalah melalui kebijakan:

1. Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam budidaya peternakan dan perikanan
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan
3. Mengembangkan teknik budidaya peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan

Strategi untuk mencapai Misi 3 adalah melalui kebijakan:

1. Pengembangan promosi hasil peternakan dan perikanan
2. Memfasilitasi berkembangnya jaringan kemitraan agribisnis Peternakan dan perikanan

Strategi untuk mencapai Misi 4 adalah melalui kebijakan:

1. Memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat mengenai kesehatan hewan, ikan dan kesehatan masyarakat veteriner

II.3.2 KEBIJAKAN

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur peternakan dan perikanan dalam pelayanan, melalui program Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan, melalui

- program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan pendidikan dan latihan peternakan dan perikanan melalui program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 4. Meningkatkan evaluasi kinerja melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 5. Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam budidaya peternakan dan perikanan, melalui program peningkatan produksi hasil peternakan dan perikanan;
 6. Meningkatkan SDM pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan dengan memfungsikan kelembagaan ekonomi masyarakat peternakan, melalui program peningkatan kesejahteraan petani;
 7. Mengembangkan teknik budidaya perternakan dan perikanan yang ramah lingkungan, melalui program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan perikanan, melalui program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya;
 8. Pengembangan promosi hasil peternakan dan perikanan melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 9. Memfasilitasi berkembangnya jalinan kemitraan, melalui program peningkatan agribisnis;
 10. Meningkatkan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang sinergis, melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak;
 11. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal;
 12. Perluasan lapangan kerja sub sektor peternakan dan perikanan yang berbasis agribisnis yang berdaya saing;
 13. Mendorong produktivitas usaha;
 14. Meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk industri berbahan baku lokal/komponen lokal;

II.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Perjanjian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	1. Level Maturitas SPIP 2. Hasil Evaluasi AKIP 3. Kualitas Pelaporan Keuangan	3 BB 700	Nilai Nilai Nilai
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Nilai
3. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi daging 2. Jumlah produksi telur	126.310 14.020	Ton Ton
4. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	785,65 24.999,8	Ton Ton
5. Meningkatnya Kesejahteraan pelaku usaha peternak dan perikanan	NTP (Nilai Tukar Petani)	112,9	Indeks
6. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah jaringan kemitraan	16	Kelompok

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Program dan Kegiatan 2022

No	Anggaran	No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Urusan	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.638.283.500
		2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	40.000.000
		3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	433.610.000
		4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.467.114.000
		5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.800.000.000
		6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.233.979.500
2	APBD Kab. Non Urusan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.741.354.917
Jumlah				19.354.332.917

III. AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Target dan Realisasi Tahun 2022

Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 dapat diukur berdasarkan target dan realisasi sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah melalui: level maturitas SPIP target nilai 3 dengan realisasi nilai 3 atau persentase capaian 100%, Hasil evaluasi AKIP target nilai BB (70,00) dengan realisasi nilai BB (71,71) atau persentase capaian 102,44%, dan kualitas pelaporan keuangan target nilai 700 dengan realisasi nilai 548,92 atau persentase capaian 78,42%.
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari target nilai 85,00 realisasi nilai 87,16 atau persentase pencapaian target sebesar 102,54%.
3. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas, dengan jumlah produksi daging dari target 126.310 ton, realisasi 146.982 ton atau persentase pencapaian target sebesar 116,37%, dan jumlah produksi telur dari target 14.020 ton, realisasi 30.797 ton atau persentase pencapaian target sebesar 219,66%.
4. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas, dengan jumlah produksi perikanan tangkap dari target 785,65 ton, realisasi 300,17 ton atau persentase pencapaian target sebesar 38,21%, dan jumlah produksi perikanan budidaya dari target 24,999,80 ton, realisasi 24.999,94 ton atau persentase mencapai 100,001%.
5. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan, dari target indeks 112,9, realisasi indeks 103,30 atau persentase pencapaian target sebesar 91,50%.

6. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan, dari target 16 kelompok, realisasi 16 kelompok atau persentase sebesar 100%.

b. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021

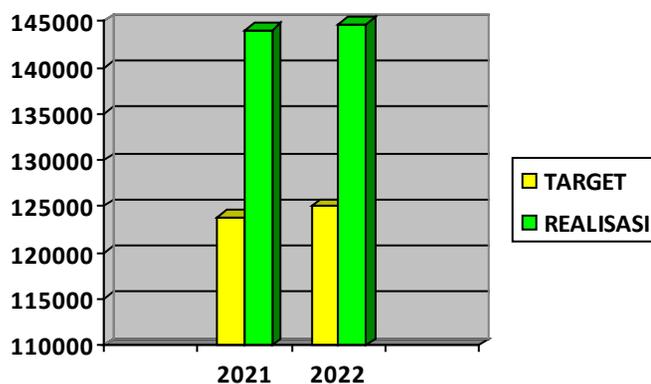
1) Produksi Peternakan

Hasil Produksi peternakan yaitu daging dan telur. Daging yang dihasilkan dari daging sapi, kerbau, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Telur yang dihasilkan terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Adapun realisasi produksinya sebagai berikut :

- Produksi Daging

Target produksi komoditas daging tahun 2022 sebanyak 125.060 ton dengan realisasi produksi mencapai 144.728 ton atau persentase pencapaian sebesar 115,73%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi daging tahun 2021 dan tahun 2022 yang mana ada kenaikan produksi daging sebesar 670 ton seperti pada Gambar 1. dibawah ini.

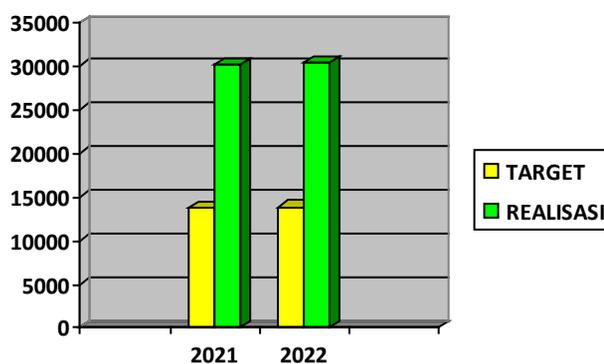
Gambar 1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2021 dan 2022



- Produksi Telur

Target produksi komoditas telur tahun 2022 sebanyak 13.882 ton dengan realisasi produksi mencapai 30.348 ton atau persentase pencapaian sebesar 218,62%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi telur tahun 2021 dan tahun 2022 yang mana ada kenaikan produksi telur sebesar 157 ton seperti pada Gambar 2. dibawah ini.

Gambar 2. Realisasi Produksi Telur Tahun 2021 dan 2022



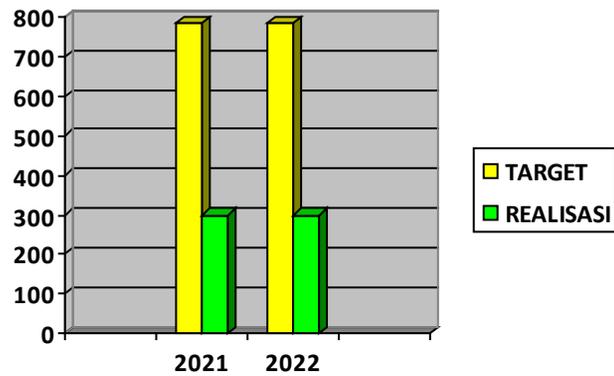
a. Produksi Perikanan

Hasil Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meliputi ikan Betok, ikan Nila, ikan Gabus, ikan Nilem, ikan Sepat rawa, Ikan Mas, Ikan Tawes, ikan Lalawak, ikan Baung, ikan Patin, Lobster. Produksi Perikanan Budidaya meliputi udang galah, ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Lele dan ikan lainnya. Adapun realisasi produksinya sebagai berikut :

- Produksi Perikanan Tangkap

Target produksi komoditas ikan tangkap tahun 2022 sebanyak 785,50 ton dengan realisasi produksi mencapai 300,02 ton atau persentase pencapaian sebesar 38,19%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi ikan tahun 2021 dan tahun 2022 seperti pada Gambar 3. dibawah ini.

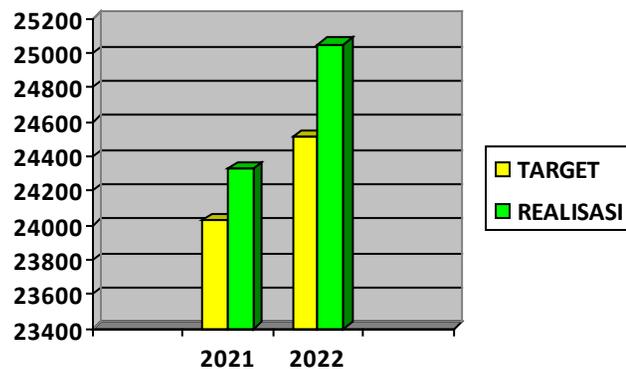
Gambar 3. Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2021 dan 2022



- Produksi Perikanan Budidaya

Target produksi komoditas ikan budidaya tahun 2022 sebanyak 24.509,60 ton dengan realisasi produksi mencapai 25.049,99 ton atau persentase pencapaian sebesar 102,21%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi ikan tahun 2021 dan tahun 2022 seperti pada Gambar 4. dibawah ini.

Gambar 4. Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2021 dan 2022



c. Analisis Permasalahan dan Solusi Pencapaian Target Kinerja

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022 beserta solusinya dapat dilihat dari tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3. Permasalahan dan Solusi Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Ciamis Tahun 2022

NO	MASALAH	SOLUSI
1	Masih ada kelompok peternak pembibitan sapi potong yang tidak konsisten dengan kegiatan pembibitan sapi potong karena masih menganggap usaha pembibitan sapi potong kurang efisien	- Melakukan seleksi calon penerima bantuan program pembibitan sapi potong secara ketat dan tepat sasaran.
		- Pengadaan ternak bibit diupayakan 50% sudah bunting.
2	Tidak termonitornya perkembangan ternak yang bersumber dari kegiatan hibah	Pengalokasian dana terpisah (tidak disatukan) dengan kegiatan lain
3	Rendahnya capaian PAD dari pasar hewan dan pasar ikan	Perbaharuan pengelola/profesionalisme pengelolaan asset
4	Keterbatasan Jumlah tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Ciamis	Rekuitmen tenaga dokter hewan, sarjana kedokteran hewan dan paramedis veteriner
5	Masih rendahnya peran aktif masyarakat untuk melaporkan kepada petugas dinas terkait kejadian kasus kematian ayam dan kasus gigitan HPR	Melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperan aktif dalam pelaporan kejadian kasus penyakit hewan menular
6	Belum terdatanya usaha pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Ikan, tempat pemotongan hewan dan unggas skala kecil, pasar yang menjual PAH, olahan PAH dan ikan di Wilayah Kabupaten Ciamis	Koordinasi dengan UPTD Wilayah, Penyuluh untuk pendataan usaha pengolahan PAH dan Ikan di Wilayah Kabupaten Ciamis
7	Banyaknya titik penyelenggaraan pemotongan hewan qurban di wilayah Kabupaten Ciamis	- Pendataan titik penyelenggaraan pemotongan hewan qurban bekerjasama dengan para penyuluh/UPTD Wilayah
		- Meningkatkan kerjasama dengan MUI kecamatan
8	Masih terdapat pemotongan hewan betina produkti	Meningkatkan pengawasan dan monitoring pada titik bandar penjualan hewan betina, Sosialisasi kepada masyarakat
9	Terjadinya wabah ND dan pullorum musiman setiap tahun sehingga ada kematian pada ternak unggas	Pengobatan pada ternak hidup dan vaksinasi pada ternak yang sehat
10	Tingginya kematian ternak pada unggas (seperti wabah ND dan Pullorum) sehingga mempengaruhi	Pengantisipasi terhadap wabah penyakit terutama pada musim hujan dan

	pada percepatan peningkatan populasi, dikarenakan pada faktor penyakit dan iklim.	pancaroba dengan melakukan vaksinasi ulang pada ternak yang sehat.
11	Tidak terawasinya lalu lintas ikan sakit yang diperjualbelikan oleh pedagang ikan yang menyebabkan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan di wilayah Kabupaten Ciamis	Meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan
12	Banyaknya sub kegiatan dengan dana terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan promosi melalui media lain untuk lebih mengenalkan usaha peternakan kepada masyarakat kurang optimal.	Lebih mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk pelaksanaan promosi peternakan.
13	Perlu pembinaan yang lebih intensif untuk para pengolah hasil peternakan untuk menghasilkan produk yang mempunyai izin edar sehingga pemasaran dapat lebih luas dan dapat meningkatkan jaminan keamanan produk.	Berkoordinasi dengan seksi kesmavet dan dinas kesehatan untuk fasilitasi izin edar (PIRT, HALAL dan PRA NKV)
14	Serangan penyakit ikan disebabkan oleh fluktuasinya suhu perairan dan curah hujan yang tinggi	- Bekerjasama dengan Balai Karantina Ikan dalam hal pengecekan dan pencegahan meluasnya penularan penyakit ikan
		- Memberikan sosialisasi kepada pembudidaya ikan agar mengantisipasi dan mengatur pemasukan air ke kolam pemeliharaan
15	Menurunnya secara drastis populasi ikan di perairan umum	- Melaksanakan restocking di perairan umum
		- Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai pengelola dan pengawas perairan umum
16	Terbatasnya jumlah maupun mutu induk unggul	Bekerjasama dengan Balai/UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam hal pengadaan/bantuan induk unggul

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja dan Capaian Sasaran Strategis

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021, Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 2 urusan yaitu :

1. Urusan Pertanian Sub Urusan Peternakan

Urusan Pertanian sub Urusan Peternakan terdiri dari 3 Program, 7 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

• *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :*

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :

1.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

1.2 Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman

2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi sub kegiatan :

2.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

• *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian :*

1. Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :

1.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

• *Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :*

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan

Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :

- 1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan :
 - 3.1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan :
 - 4.1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
- *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*
 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kepada realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, diantaranya adalah target produksi daging, target produksi telur.
Meningkatnya Produksi Ternak yang Sehat dan Berkualitas

- *Produksi Daging*

Tabel 4. Target dan Realisasi Produksi Daging Tahun 2022

Komoditas	2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Produksi Daging	125.060	144.728	115,73
Sapi Potong	1.199	1.803	150,38
Kerbau	68	61	89,71
Domba	466	211	45,28

Kambing	348	69	19,83
Ayam Buras	1.559	1.576	100,09
Ayam Ras Pedaging	120.071	138.718	115,53
Ayam Ras Petelur	1.206	2.113	175,21
Itik	139	137	98,56

Berdasarkan Tabel 4. diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi daging tahun 2022 dengan capaian kumulatif sebesar 115,73%. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya produksi dari komoditas daging terutama daging unggas. Bahkan untuk komoditas ayam ras petelur peningkatan produksi dagingnya mencapai 175,21% dari target tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh populasi dari ayam ras petelur di Kabupaten Ciamis yang meningkat cukup signifikan dan banyaknya para peternak baru ayam ras petelur. Untuk komoditas ayam ras pedaging yang produksinya mengalami peningkatan mencapai 115,53% dari target tahun 2022. Peningkatan produksi daging ayam ras pedaging ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Adanya introduksi teknologi dalam pemeliharaan ternak seperti penggunaan kandang *close house*;
- Permintaan pasar terhadap bobot hidup mengalami peningkatan dari 0,8 kg menjadi 1,3 kg;
- Kualitas pakan semakin baik sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ayam;
- Efisiensi waktu produksi (bobot 1,3 kg biasa dicapai dalam 33 hari menjadi 28 hari);
- Kualitas genetik DOC semakin baik;
- Keseragaman produksi atau pertumbuhan ayam lebih bagus;
- Manajemen pemeliharaan yang semakin baik (vaksinasi, vitamin dan kebersihan kandang), sehingga ayam terhindar dari penyakit dan stress.

Sedangkan untuk komoditas dari ternak ruminansia besar (ternak sapi dan kerbau) ternak sapi potong sesuai

target tahun 2022, hanya untuk komoditas kerbau dibawah target 2022 yaitu hanya mencapai 89,71%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya populasi ternak kerbau di Kabupaten Ciamis. Salah satu penyebabnya adalah tergantikannya fungsi utama kerbau untuk membajak lahan pertanian (sawah) oleh penggunaan mesin traktor. Untuk Ternak rumansia kecil (ternak domba dan kambing) mengalami penurunan yang cukup besar yaitu ternak domba 45,28% dan ternak kambing 19,83% yang disebabkan oleh penurunan parameter Unreg domba dan kambing sesuai dengan Surat dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Nomor 524.8/81/perenc, tanggal 15 Januari 2020 perihal perubahan parameter unregister pemotongan domba dan kambing. Sehingga jumlah produksi daging domba dan kambing menurun sedangkan jumlah populasi ternak domba dan kambing menjadi meningkat.

- *Produksi Telur*

Target produksi komoditas telur tahun 2022 sebanyak 13.881 ton dengan realisasi produksi mencapai 30.348 ton atau persentase pencapaian sebesar 218,62%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi telur tahun 2021 dan tahun 2022 yang mana ada kenaikan produksi telur sebesar 157 ton.

2. Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan

Urusan Pertanian sub Urusan Peternakan terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu:

- *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi sub kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*
 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi sub kegiatan :
 - 1.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 2.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Produksi Perikanan yang Sehat dan Berkualitas

Hasil Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meliputi ikan Betok, ikan Nila, ikan Gabus, ikan Nilem, ikan Sepat rawa, Ikan Mas, Ikan Tawes, ikan Lalawak, ikan Baung, ikan Patin, Lobster. Produksi Perikanan Budidaya meliputi udang galah, ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Lele dan ikan lainnya.

- *Produksi Perikanan Tangkap*

Target produksi komoditas ikan tangkap tahun 2022 sebanyak 785,50 ton dengan realisasi produksi mencapai 300,02 ton atau persentase pencapaian sebesar 38,19%. Target dan realisasi produksi ikan tangkap berdasarkan komoditas ikannya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5. dibawah ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022

Komoditas	2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah Produksi Ikan Tangkap	95.051	95.625	100,60
Ikan Mas	6.697	6736	100,58
Ikan Nila	45.376	45.653	100,61
Ikan Nilem	7.542	7.588	100,61
Ikan Gurame	9.272	9.328	100,60
Ikan Patin	1.490	1.499	100,60
Lele	17.784	17.890	100,60
Tambakan	3.015	3.033	100,60
Sepat Siem	2.252	2.266	100,62
Bawal	1.086	1.093	100,64
Udang galah	420	423	100,71
Mujair	96	96	100,00
Ikan Lainnya	21	20	95,24

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi ikan tahun 2022 dengan capaian kumulatif sebesar 100,60%. Hal ini dipengaruhi oleh

peningkatan jumlah pembudidaya ikan di masyarakat dan sarana prasarana penunjang yang terus diperbaiki seperti pasar ikan serta semakin bertambahnya pembangunan UPR setiap tahunnya.

Masalah yang ditemui pada tahun 2022 adalah serangan penyakit akibat adanya fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu, pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga yang menyebabkan kualitas perairan menurun serta menurun drastis populasi ikan di perairan umum. Strategi pemecahan persoalan diatas dengan cara bekerja sama dengan penyuluh lapangan untuk segera melakukan pengobatan, memberikan sosialisasi kepada pembudidaya ikan agar mengantisipasi dan mengatur pemasukan air ke kolam ikan, bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan limbah serta melaksanakan restocking di perairan umum.

- *Produksi Perikanan Budidaya*

Target produksi komoditas ikan budidaya tahun 2022 sebanyak 24.509,60 ton dengan realisasi produksi mencapai 24.749,97 ton atau persentase pencapaian sebesar 100,98%. Target dan realisasi produksi ikan tangkap berdasarkan komoditas ikannya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6. dibawah ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022

JENIS KOMODITAS	TOTAL		Harga/Kg
	PRODUKSI (Ton)	NILAI PRODUKSI (Rp. 1000)	
Budidaya Air Tawar			
- Kolam Air Tenang	24,536.25	521,743,877.88	
a. Bawal/Beli	280.61	3,647,982.25	13,000
b. Gurame	2,407.47	96,298,705.45	40,000
c. Lele	4,637.32	60,285,113.87	13,000

d. Mas	1,414.10	32,524,201.26	23,000
e. Mujair	77.78	1,322,271.53	17,000
f. Nila	11,071.81	221,436,218.70	20,000
g. Nilem	1,918.53	44,126,273.26	23,000
h. Patin	391.35	4,696,188.92	12,000
i. Sepat siam	506.45	10,129,016.85	20,000
j. Tambakan	781.02	17,963,387.23	23,000
k. Tawes	944.33	21,719,558.84	23,000
l. Udang Galah	105.49	7,594,959.70	72,000
- Minapadi	84.57	1,730,263.86	
a. Ikan Mas	12.95	297,956.28	23,000
b. Ikan Nila	71.62	1,432,307.59	20,000
- Keramba Jaring Apung	47.04	1,024,018.16	
a. Ikan Mas	27.74	638,005.87	23,000
b. Ikan Nila	19.30	386,012.29	20,000
- Kolam Air Deras	82.11	1,679,931.81	
a. Ikan Mas	12.58	289,277.21	23,000
b. Ikan Nila	69.53	1,390,654.60	20,000
JUMLAH TOTAL	24,749.97	526,178,091.71	

Ikan Hias

No.	Komoditas	Total (Ekor)
1	Cupang	52,336
2	Koi	199,176
3	Komet	33,407
4	Lou Han	5,476
5	Mas Koki	10,182
	Jumlah	300,576

Benih

No.	Komoditas	Total Produksi (Ekor)
1	Gurame	35,700,000
2	Lele	196,000,000
3	Mas	14,300,000
4	Mujaer	824,960
5	Nila	497,000,000
6	Nilem	20,348,470

7	Sepat Siem	5,371,550
8	Tambakan	8,283,670
9	Tawes	10,016,160
	Jumlah	787,844,810

Tabel 7. Target dan Realisasi Produksi Ikan Tangkap

No	Uraian	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	(%)
1.	Produksi Ikan Tangkap	295,00	300,18	100,70

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi produksi ikan tahun 2022 dengan capaian kumulatif sebesar 100,70%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pembudidaya ikan di masyarakat dan sarana prasarana penunjang yang terus diperbaiki seperti pasar ikan serta semakin bertambahnya pembangunan UPR setiap tahunnya.

Masalah yang ditemui pada tahun 2022 adalah serangan penyakit akibat adanya fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu, pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga yang menyebabkan kualitas perairan menurun serta menurun drastis populasi ikan di perairan umum. Strategi pemecahan persoalan diatas dengan cara bekerja sama dengan penyuluh lapangan untuk segera melakukan pengobatan, memberikan sosialisasi kepada pembudidaya ikan agar mengantisipasi dan mengatur pemasukan air ke kolam ikan, bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan limbah serta melaksanakan restocking di perairan umum.

II.2 REALISASI ANGGARAN

III.2.1 REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 untuk Urusan pilihan pembangunan Peternakan dan Perikanan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.354.332.917,00, realisasi keuangan sebesar Rp.18.926.606.923,00 atau mencapai 97,79%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 427.725.994,00. Adapun rincian program adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.467.114.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.376.818.373,00 atau mencapai 98,35% ada sisa anggaran sebesar Rp. 90.295.627,00 dan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 781.500.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 754.739.373,00 atau mencapai 96,58% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian sebanyak 1 VUB.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.285.644.000,00, realisasi keuangan sebesar

Rp.269.975.000,00 atau mencapai 94,51% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebanyak 4 dokumen.

- Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.399.970.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.4.352.104.000,00 atau mencapai 98,91% ada sisa anggaran sebanyak Rp. 47.866.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain sebanyak 10.000 ekor.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.233.979.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.229.720.500,00 atau mencapai 99,65%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 4.259.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 312.475.500,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 311.766.500,00 atau mencapai 99,77% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya

adalah Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis sebanyak 1 laporan.

- Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :

- 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dengan jumlah anggaran Rp.560.754.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.557.854.000,00 atau mencapai 99,48%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan sebanyak 1 laporan.

- Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan :

- 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan jumlah anggaran Rp.40.750.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.40.100.000,00 atau mencapai 98,40%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan sebanyak 1 Laporan.

- Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan :

- 1) Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan dengan jumlah anggaran Rp.320.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.320.000.000,00 atau mencapai 100%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah

Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan sebanyak 1 Laporan.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.638.283.500,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.612.108.480,00 atau mencapai 98,95%. Dalam program ini ada sisa anggaran sebesar Rp. 26.175.020,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.212.500,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 48.697.500,00, atau mencapai 98,95% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 180.000.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 unit.
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.350.071.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.324.410.980,00 atau mencapai 99,23% ada sisa anggaran sebesar Rp. 25.660.020,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya

adalah Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 unit.

- 4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.59.000.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat sebanyak 10 orang.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan dan 2

(dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 433.610.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 433.610.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko sebanyak 5 Unit Usaha.
- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 383.610.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 383.610.000,00 atau mencapai 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 Ton.

Adapun Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Non Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.741.345.917,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 6.510.697.570,00 atau mencapai 96,58%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 230.648.347,00 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.029.500,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 27.874.500,00 atau mencapai 99,45% ada sisa anggaran sebesar Rp.150.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 Dokumen;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.277.200,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.277.200,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja

- keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Dokumen;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.426.114.124,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.220.292.334,00 atau mencapai 96,21% ada sisa anggaran sebesar Rp. 205.821.790,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 Bulan;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 dokumen;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000,00 atau mencapai 100,00%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 dokumen;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.105.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.3.105.000,00 atau mencapai 100%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 Paket;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77.531.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 77.431.000,00 atau mencapai 99,87% ada sisa anggaran sebesar Rp. 100.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 Paket;

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.905.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 15.905.000,00 atau mencapai 100%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Paket;
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.406.300,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 19.398.800,00 atau mencapai 99,96% ada sisa anggaran sebesar Rp. 7.500,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 5 Paket;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.167.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.17.167.000,00 atau mencapai 100%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan sebanyak 5 Dokumen;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.137.747.293,00, realisasi keuangan sebesar Rp.137.558.913,00 atau mencapai 99,86% ada sisa anggaran sebesar Rp. 188.380,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 2 Laporan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.230.000,00, realisasi keuangan sebesar

Rp.10.000.000,00 atau mencapai 97,75% ada sisa anggaran sebesar Rp. 230.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 4 Unit.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.86.903.500,00, realisasi keuangan sebesar Rp.85.498.323,00 atau mencapai 98,38% ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.405.177,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 178.081.200,00 atau mencapai 89,94% ada sisa anggaran sebesar Rp. 19.918.800,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.399.730.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.397.118.300,00 atau mencapai 99,35% ada sisa anggaran sebesar Rp. 2.611.700,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala sebanyak 66 unit;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 22.760.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 22.760.000,00 atau mencapai 100%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 15 unit;

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.440.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp. 250.230.000,00 atau mencapai 99,92% ada sisa anggaran sebesar Rp. 210.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran sub kegiatannya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 1 Unit;

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis mendapatkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan pilihan pembangunan Peternakan dan Perikanan, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.1.798.652.000,00 atau mencapai 99,93%, dengan realisasi fisik mencapai 100% ada sisa anggaran sebesar Rp.1.348.000,00. Adapun rincian program adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.798.652.000,00 atau mencapai 99,93% ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.348.000,00 dan realisasi fisik mencapai 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp.1.798.652.000,00 atau mencapai 99,93% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator kinerja keluaran kegiatannya adalah Presentase Prasarana Pertanian Yang Dibangun sebesar 20 persen.

III.2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Adapun sumber PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 berasal dari hasil retribusi daerah yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (pasar ikan dan pasar ternak) serta retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dengan rincian tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Target Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

Uraian	Vol.	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hasil Sewa BMD				60.256.000
• Pasar Ikan Imbanagara	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Pasar Ikan Cihaurbeuti	1	tahun	5.300.000	5.300.000
• Pasar Ikan Golat Panumbangan	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Pasar Ikan Maleber	1	tahun	7.000.000	7.000.000
• Pasar Ikan Banjarsari	1	tahun	3.000.000	3.000.000
• Pasar Ikan Kawali	1	tahun	6.000.000	6.000.000
• Retribusi Pelataran Pasar Ternak	1	tahun	26.956.000	26.956.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)				32.225.000
• RPH Ciamis	680	ekor	25.000	17.000.000
• RPH Banjarsari	609	ekor	25.000	15.225.000
Jumlah				92.481.000

Berdasarkan Tabel 8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Pasar Ikan Imbanagara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pasar ikan yang lainnya dikarenakan volume penjualan di tempat tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ikan lainnya. Sedangkan untuk retribusi pasar ikan Banjarsari dengan target terendah dikarenakan pasar ikan Banjarsari operasionalnya belum berjalan secara optimal dan masih dalam proses penambahan/pembangunan sarana dan prasarana.

Besaran penerimaan retribusi RPH berasal dari RPH Ciamis dan RPH Banjarsari dengan target 2022 pemotongan sebanyak

1.289 ekor dengan retribusi yang dikenakan sebesar Rp.25.000/ekor.

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), adapun untuk pasar hewan dan ikan didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Kepala Disnakan dan Pengelola pasar). PAD Tahun 2022 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 31 Desember 2022 ditargetkan sebesar Rp. 92.481.000,00. Target PAD tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan PA tahun 2021. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 mencapai Rp. 91.581.000,00 atau 99,02%. Realisasi penerimaan PAD Tahun 2022 tersaji pada Tabel 9. berikut ini.

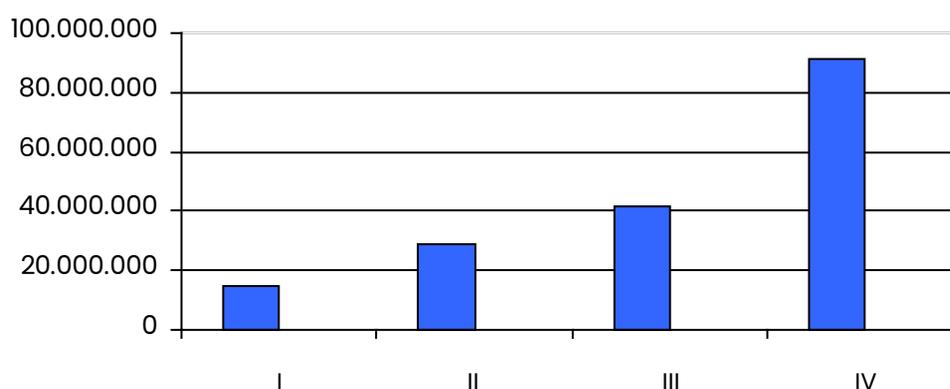
Tabel 9. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022

Retribusi Per Triwulan	Hasil Sewa BMD	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah	%
a. Triwulan I	5.400.000	3.310.000	6.000.000	14.710.000	15,91
b. Triwulan II	11.000.000	6.710.000	11.000.000	28.710.000	31,04
c. Triwulan III	15.100.000	11.290.000	16.500.000	41.890.000	45,29
d. Triwulan IV	32.400.000	26.956.000	32.225.000	91.581.000	99,02
Jumlah	32.400.000	26.956.000	32.225.000	91.581.000	99,02

Berdasarkan Tabel 9. dapat dianalisis penerimaan PAD pada setiap triwulan mengalami peningkatan, terutama pada triwulan IV yang mencapai 99,02% dari target PAD tahun 2022. Kenaikan penerimaan PAD per triwulan tersaji pada Gambar 5. dibawah ini.

Gambar 5. Penerimaan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

Tabel Data PAD



Penerimaan PAD setiap triwulannya menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini didorong oleh bertambahnya pemotongan di RPH, meningkatnya aktivitas jual beli di pasar hewan dan pasar ikan. Pengoptimalan dan peningkatan sarana prasarana serta kemampuan petugas pemungut retribusi daerah merupakan salah satu cara yang dinilai efektif dalam peningkatan penerimaan PAD. Faktor penting lainnya dalam penerimaan PAD ini adalah adanya peningkatan konsumsi daging dan ikan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian pada triwulan IV tahun 2022 sehingga daya beli masyarakat terhadap komoditas peternakan (daging) dan ikan meningkat.

III.2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Belanja Daerah

Guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan kedua undang-undang ini memberikan pengaruh perubahan terhadap tata laksana manajemen keuangan di daerah baik dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja Pemerintah Daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi Pemerintah Daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antara para legislatif dan birokrasi.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (*outcome/output*) dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

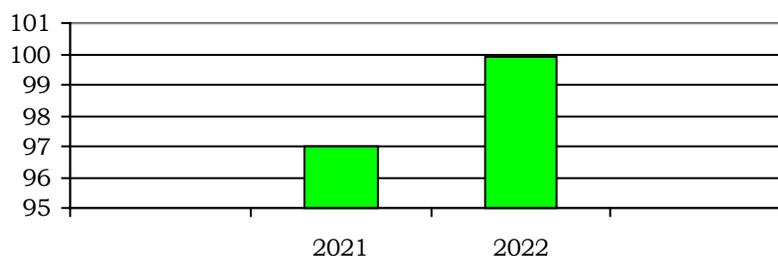
Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp. 19.354.332.917,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.203.948.795,00 atau mencapai 99,22%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.150.384.122,00 yang berasal dari Kabupaten sebesar Rp.17.554.332.917,00 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan pilihan pembangunan Peternakan dan Perikanan, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

1.800.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.798.652.000,00 atau mencapai 99,93%, dengan realisasi fisik mencapai 100% ada sisa anggaran sebesar Rp.1.348.000,00.

Capaian realisasi belanja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2021 seperti tersaji pada Gambar 6. dibawah ini.

Gambar 6. Persentase Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Persentase Realisasi Belanja



a) Belanja Pegawai

Jumlah anggaran belanja pegawai Tahun 2022 sebesar Rp. 5.426.114.124,00, dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.220.292.334,00 atau mencapai 96,21%, dengan sisa anggaran Rp. 205.821.790,00.

b) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2022 sebesar Rp. 6.150.184.793,00, dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.097.273.389,00 atau mencapai 99,14%, dengan sisa anggaran Rp.52.911.404,00.

c) Belanja Modal

Jumlah anggaran belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 220.534.000,00, dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 217.434.000,00 atau mencapai 98,59%, dengan sisa anggaran Rp. 3.100.000,00.

Realisasi dan sisa anggaran tersaji pada Tabel 10. sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Belanja Langsung

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	5.426.114.124	5.220.292.334	205.821.790
2	Belanja Barang & Jasa	6.150.184.793	6.097.273.389	52.911.404
3	Belanja Modal	220.534.000	217.434.000	3.100.000

IV. PENUTUP

Penyusunan LAKIP tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Ciamis dan Banjarsari sebesar Rp. 32.225.000,00. Retribusi Pasar Hewan Ciamis, Rancah, Rajadesa, Panjalu, Lakbok, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi) sebesar Rp. 26.956.000,00. Hasil sewa BMD dari enam Pasar Ikan (Imbanagara, Cihaurbeuti, Golat, Maleber, Banjarsari dan Kawali) sebesar Rp. 36.600.000,00. Jumlah total keseluruhan PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 95.781.000,00. Adapun realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 95.781.000,00 atau mencapai 100%.

Berdasarkan sumber anggarannya program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pencapaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	APBD Kab. Non Urusan	1 Program 6 Kegiatan 22 Sub Kegiatan	6.741.345.917	6.713.039.442	99,58	28.306.475
2	APBD Kab. Urusan Pilihan	6 Program 11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	10.812.987.000	10.692.257.353	98,88	120.729.647
3	APBD Prov.	3 Program 4 Kegiatan	PM	PM	100	-
4	APBN	4 Program 7 Kegiatan	PM	PM	100	-
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Program 1 Kegiatan	1.800.000.000	1.798.652.000	99,92	1.348.000

Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan DAK tahun 2022 yang berasal dari efisiensi sisa kontrak.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp. 19.354.332.917,00. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.19.203.948.795,00 atau mencapai 99,22%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150.384.122,00.

PAD Tahun 2022 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis sampai 31 Desember 2022 ditargetkan sebesar Rp. 95.781.000,00. Target PAD tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan PAD tahun 2021. Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 mencapai Rp. 95.781.000,00 atau 100%.

Capaian realisasi produksi ternak dan ikan di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sehingga dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2022. Prestasi ini membanggakan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. Terutama untuk komoditas unggulan seperti daging, telur, ikan Nila dan ikan mas. Selain itu, kedepan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi ternak dan budidaya ikan akan ditambah guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan ikan sehingga akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Ciamis.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan pembinaan dan memberikan dorongan kepada para peternak dan pembudidaya ikan untuk mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah baik tingkat provinsi maupun pusat. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi peternak dan pembudidaya ikan agar lebih kreatif dan mampu bersaing dengan peternak dari daerah lain.

LAMPIRAN

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2022
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	1. Level Maturitas SPIP	3 nilai	3,00	100,00	
		2. Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	100,00	
		3. Kualitas Pelaporan Keuangan	700 nilai	548,92	78,42	
2.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00 nilai	87,16	102,54	
3.	Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	1. Jumlah produksi daging	126.310 ton	146.982,00	116,37	
		2. Jumlah produksi telur	14.020 ton	30.797,00	219,66	
4.	Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	785,65 ton	300,17	38,21	
		2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	24.999,80 ton	24.999,94	100,001	
5.	Meningkatnya Kesejahteraan pelaku usaha peternak dan perikanan	NTP (Nilai Tukar Petani)	112,90 indeks	103,30	91,50	
6.	Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah jaringan kemitraan	16 kelompok	16,00	100,00	



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2022
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.638.283.500	3.612.108.480	99,28	
Indikator Output Program :				
Jumlah produksi perikanan budidaya	24.509,60	24.509,60	100,00	
Satuan Indikator : Ton				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.638.283.500	3.612.108.480	99,28	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah produksi perikanan budidaya	24.999,80	24.999,80	100,00	
Satuan Indikator : ekor				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.212.500	48.697.500	98,95	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,00	
Satuan indikator : Dokumen				
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	180.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	100,00	
Satuan indikator : unit				
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.350.071.000	3.324.410.980	99,23	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100,00	
Satuan indikator : unit				
4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	59.000.000	59.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10	10	100,00	
Satuan indikator : orang				
2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	40.000.000	100,00	
Indikator Output Program :				
Cakupan lokasi perikanan tangkap yang diawasi	4	4	100,00	
Satuan Indikator : lokasi				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00	
Indikator Output Kegiatan :				
Cakupan Lokasi Perikanan Tangkap yang Diawasi	4	4	100,00	
Satuan Indikator : lokasi				
Sub Kegiatan :				
1. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	1	100,00	
Satuan indikator : Dokumen				
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	433.610.000	433.610.000	100,00	
Indikator Output Program :				
Persentase kelompok yang meningkatkan usahanya	5	5,00	100,00	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000	50.000.000	100,00	
Indikator Output Program :				
Persentase kelompok yang meningkat usahanya	5	5	100,00	
Satuan indikator : %				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Sub Kegiatan :				
1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000	50.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	10	100,00	
Satuan indikator : Unit Usaha				
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	383.610.000	383.610.000	100,00	
Indikator Output Program :				
Persentase kelompok yang meningkat usahanya	5	5	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub Kegiatan :				
1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	383.610.000	383.610.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000	2.000	100,00	
Satuan indikator : Ton				
4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.181.470.000	5.106.843.373	98,56	
Indikator Output Program :				
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1	1,20	120,00	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	781.500.000	754.739.373	96,58	
Indikator Output Program :				
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1	1	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub Kegiatan :				
1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	781.500.000	754.739.373	96,58	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1	1	100,00	
Satuan indikator : VUB				
2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	285.644.000	269.975.000	94,51	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	4	100,00	
Satuan indikator : dokumen				
2. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	4.399.970.000	4.352.104.000	98,91	
Indikator Output Kegiatan :				
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1	1	100,00	
Satuan indikator : %				
1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.399.970.000	4.352.104.000	98,91	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10.000	10.000	100,00	
Satuan indikator : ekor				
5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.800.000.000	1.798.652.000	99,93	
Indikator Output Program :				
Presentase prasarana pertanian yang dibangun	20	20	100,00	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.800.000.000	1.798.652.000	99,93	
Indikator Output Program :				
Presentase Prasarana Pertanian Yang Dibangun	20	20	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub kegiatan :				
1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.800.000.000	1.798.652.000	99,93	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	5	100,00	
Satuan indikator : Unit				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
6. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.233.979.500	1.229.720.500	99,65	
Indikator Output Program :				
Prosentase penurunan kasus penyakit hewan yang bersifat zoonosis	25	25	100,00	
Satuan indikator : %				
Kegiatan :				
1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	312.475.500	311.766.500	99,77	
Indikator Output Kegiatan :				
Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	50	50	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub kegiatan :				
1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	312.475.500	311.766.500	99,77	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	1	100,00	
Satuan indikator : laporan				
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	560.754.000	557.854.000	99,48	
Indikator Output Kegiatan :				
Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	50	50	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub kegiatan :				
1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	560.754.000	557.854.000	99,48	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	1	100,00	
Satuan indikator : laporan				
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.750.000	40.100.000	98,40	
Indikator Output Kegiatan :				
Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	50	50	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub kegiatan :				
1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	40.750.000	40.100.000	98,40	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	1	100,00	
Satuan indikator : laporan				
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	320.000.000	320.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	50	50	100,00	
Satuan indikator : %				
Sub kegiatan :				
1. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	320.000.000	320.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1	1	100,00	
Satuan indikator : laporan				
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.741.345.917	6.510.697.570	96,58	
Indikator Output Program :				
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	87,16	102,54	
Satuan Indikator : %				
Indikator Output Program :				
Hasil evaluasi AKIP	BB	BB	100,00	
Satuan Indikator : Nilai				
Indikator Output Program :				
Maturitas SPIP perangkat daerah	3	3,00	100,00	
Satuan Indikator : Nilai				
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.306.700	66.151.700	99,77	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10	10	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
Sub kegiatan :				
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.029.500	27.874.500	99,45	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.277.200	3.277.200	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.436.114.124	5.230.292.334	96,21	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah laporan administrasi keuangan	2	2	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.426.114.124	5.220.292.334	96,21	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12	12	100,00	
Satuan Indikator : Bulan				
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : laporan				
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000	7.000.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	100,00	
Satuan Indikator : laporan				
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.861.593	270.565.713	99,89	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum	12	12	100,00	
Satuan Indikator : bulan				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.105.000	3.105.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00	
Satuan Indikator : paket				
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.531.000	77.431.000	99,87	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00	
Satuan Indikator : paket				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.905.000	15.905.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	
Satuan Indikator : paket				
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.406.300	19.398.800	99,96	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100,00	
Satuan Indikator : paket				
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.167.000	17.167.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	5	100,00	
Satuan Indikator : Dokumen				
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.747.293	137.558.913	99,86	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100,00	
Satuan Indikator : laporan				
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.230.000	10.000.000	97,75	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah barang yang tersedia	1	1	100,00	
Satuan Indikator : paket				
Sub kegiatan :				
1. Pengadaan Mebel	10.230.000	10.000.000	97,75	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	100,00	
Satuan Indikator : paket				
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.903.500	263.579.523	92,52	
Sub kegiatan :				
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100,00	
Satuan Indikator : bulan				
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.903.500	85.498.323	98,38	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	
Satuan Indikator : laporan				
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000	178.081.200	89,94	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	
Satuan Indikator : laporan				
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.930.000	670.108.300	99,58	
Indikator Output Kegiatan :				
Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100,00	
Satuan Indikator : bulan				
Sub kegiatan :				
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.730.000	397.118.300	99,35	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	66	66	100,00	
Satuan Indikator : Unit				
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.760.000	22.760.000	100,00	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	100,00	
Satuan Indikator : Unit				
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.440.000	250.230.000	99,92	
Indikator Output Sub Kegiatan :				
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100,00	
Satuan Indikator : Unit				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
--------------------------------------	--------	-----------	---------------------	------

Ciamis, Januari 2023
 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN CIAMIS



Drs. SYARJEH NURHIDAYAT, M.Si

NIP. 19640920 199503 1 001